

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Arah kebijakan pembangunan pertanian yang dituangkan dalam rencana strategis tahun 2010-2014 adalah terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani. Selama lima tahun ke depan untuk mewujudkannya, pemerintah mencanangkan 4 (empat) target utama dalam pembangunan pertanian yaitu : 1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) peningkatan diversifikasi pangan, 3) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, serta 4) peningkatan kesejahteraan petani (Husen, 2011).

Pembangunan pertanian merupakan pondasi dari pembangunan ekonomi dan memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Menurut Suyudi (2007), pertanian memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, diantaranya sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industri manufaktur dan perdagangan, konsumsi dalam negeri bagi produk-produk dari sektor-sektor lainnya, sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya, sumber bagi surplus perdagangan/sumber devisa. Tujuan pembangunan

pertanian menurut Arifin (2003) yaitu 1) pertumbuhan pertanian, 2) pengentasan kemiskinan, dan 3) keberlanjutan lingkungan hidup.

Terdapat banyak tantangan/hambatan di dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari internal dan eksternal. Menurut Husen (2011), hambatan dalam pembangunan pertanian yang berasal dari internal adalah ketersediaan lahan, infrastruktur pendukung produksi dan pemasaran, teknologi dan akses terhadap teknologi, pembiayaan, serta iklim usaha/investasi. Hambatan yang berasal dari eksternal yaitu pembangunan pertanian harus mampu mengatasi era globalisasi dunia. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dirumuskan dalam arah kebijakan pembangunan pertanian (Arda, 2010). Timbulnya tantangan/hambatan berimplikasi bahwa produk-produk hasil pertanian harus mampu bersaing di pasar internasional, memenuhi persyaratan wajib yaitu biaya rendah kualitas tinggi, keragaman untuk berbagai segmen pasar serta mampu mensubstitusi produk sejenis.

Sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dari berbagai sektor pada Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dari Berbagai Sektor Tahun 2013 (Dalam Satuan Milyar)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	1 091 447,1	1 193 452,9	1 311 037,3
a. Tanaman Bahan Makanan	529 967,8	574 916,3	621 832,7
b. Tanaman Perkebunan	153 709,3	162 542,6	175 248,4
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	129 297,7	145 720,0	165 162,9
d. Kehutanan	51 781,3	54 906,5	56 994,2
e. Perikanan	226 691,0	255 367,5	291 799,1
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	876 983,8	970 823,8	1 020 773,2
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1 806 140,5	1 972 523,6	2 152 592,9
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	55 882,3	62 234,6	70 074,6
5. BANGUNAN	753 554,6	844 090,9	907 267,0
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	1 023 724,8	1 148 690,6	1 301 506,3
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	491 287,0	549 105,4	636 888,4
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.	535 152,9	598 523,2	683 009,8
9. JASA – JASA	785 014,1	889 994,4	1 000 822,7
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	<b>7 419 187,1</b>	<b>8 229 439,4</b>	<b>9 083 972,2</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014

Tabel 1 menunjukkan bahwa PDB Nasional atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, dan perikanan dari tahun 2011-2013 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, dan perikanan masih berperan penting dalam pembangunan. Mengingat pentingnya sektor ini, maka sektor ini harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.

Pembangunan sektor pertanian meliputi tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, dan perikanan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Dalam satuan juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013
1	Tanaman Bahan Makanan	22.162.656	26.361.982	30.844.019
2	Tanaman Perkebunan	8.010.895	8.536.112	9.403.455
3	Peternakan dan hasil-hasilnya	5.129.595	5.695.564	6.736.805
4	Kehutanan	597.363	679.613	794.748
5	Perikanan	9.578.176	10.654.291	10.639.078
	Jumlah	45.478.685	51.927.562	58.418.105

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014

Tabel 2 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan dari tahun 2011-2013 terus mengalami peningkatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDB) tertinggi diduduki oleh sektor tanaman pangan, disusul dengan perikanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, serta kehutanan.

Pisang termasuk ke dalam tanaman bahan makanan yang memiliki peranan penting bagi perekonomian yaitu sebagai sumber pendapatan dan penyedia lapangan kerja. Jenis pisang yang banyak diperdagangkan di pasar-pasar swalayan adalah pisang cavendis dan pisang ambon. Untuk pasar-pasar tradisional, toko buah, kios dan pedagang kaki lima, jenis buah yang

diperdagangkan dan banyak dikonsumsi pasar dalam negeri adalah pisang ambon hijau, ambon kuning, mas, barangan, raja bulu, dan raja sere (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2012).

Menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung (2013), luas areal tanaman pisang dari tahun 2007 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan. Peningkatan luas areal dan peningkatan permintaan pisang dalam negeri menunjukkan bahwa komoditas pisang mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan di Provinsi Lampung. Meskipun potensi tanaman pisang cukup besar namun dalam kegiatan usahatani pisang masih mengalami berbagai masalah yang kompleks antara lain : 1) teknik budidaya masih sederhana, 2) produktivitas rendah, 3) mutu produk yang dihasilkan masih rendah, 4) sumber-sumber permodalan masih rendah, 5) penanganan pasca panen, dan 6) pemasaran (Pusat Kajian Buah Tropika, 2006).

Sentra produksi pisang di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Pesawaran dengan jumlah produksi tanaman pisang sebesar 538.416 ton dan menempati urutan pertama. Artinya, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi yang besar untuk pengembangan pisang di Provinsi Lampung karena tanah di Kabupaten Pesawaran sesuai untuk tanaman pisang. Luas areal dan produksi tanaman pisang Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Areal dan Produksi Tanaman Pisang Provinsi Lampung

Kabupaten	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
<b>Pesawaran</b>	<b>6.208</b>	<b>538.416</b>
Lampung Selatan	3.206	211.804
Lampung Timur	1.001	195.549
Lampung Tengah	208	8.760
Tanggamus	200	9.050
Way Kanan	171	3.228
Lampung Utara	170	3.996
Lampung Barat	161	3.896
Pringsewu	106	2.549
Tulang Bawang	44	1.390
Mesuji	39	507
Tulang Bawang Barat	25	1.499
Bandar Lampung	10	673
Metro	3	108
Pesisir Barat	0	2.873

Sumber : Badan Statistik Provinsi Lampung, 2014.

Jenis pisang yang banyak ditanam oleh petani di Kabupaten Pesawaran adalah jenis pisang ambon. Dahulu, petani pernah mencoba menanam jenis pisang cavendis, namun hasil produksi pisang belum optimal. Pisang cavendis yang dihasilkan ukurannya kecil-kecil sehingga sulit untuk dipasarkan dan membuat petani merugi. Hal ini dimungkinkan karena tidak sesuai tanah di daerah tersebut untuk menanam pisang cavendis. Akhirnya, petani beralih untuk menanam jenis pisang ambon dan hasilnya pun cukup memuaskan.

Untuk menunjang keberhasilan usahatani pisang di Kabupaten Pesawaran dibutuhkan sistem kemitraan. Kemitraan dalam agribisnis merupakan suatu alternatif yang dapat menjembatani antara petani dan pengusaha, antara lain dalam teknologi, permodalan, mutu, harga, dan pemasaran. Kemitraan

agribisnis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 dinyatakan bahwa bentuk kemitraan yang ideal adalah saling memperkuat, saling menguntungkan dan saling menghidupi. Konsep dari kemitraan adalah saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling tanggung jawab untuk memperkuat mekanisme pasar. Perusahaan atau pengusaha menengah/besar punya komitmen atau tanggung jawab moral membimbing dan mengembangkan pengusaha kecil/ petani sebagai mitra agar mampu mengembangkan usahanya, sehingga dapat menjadi mitra yang handal untuk meraih keuntungan bersama.

Kendala yang dihadapi bagi petani dalam kemitraan menurut Purnaningsih (2006) adalah 1) harga ditentukan secara sepihak oleh perusahaan, 2) pengetahuan petani terbatas, 3) informasi tidak tersebar secara merata, 4) tidak semua petani memiliki akses modal, teknologi dan manajemen, dan 5) keberpihakan perusahaan terkadang tidak kepada petani. Adapun kendala bagi pihak perusahaan antara lain adalah kemampuan manajemen dan kemampuan dalam menyediakan dana. Perusahaan harus mampu menyediakan dana yang cukup besar sebelum memperoleh keuntungan dari kemitraan yang akan dilaksanakan, karena berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Apabila tidak ada ketersediaan dana yang cukup maka kegiatan usaha akan terhenti di tengah jalan. Kemampuan manajemen perusahaan menyangkut keahlian para petugas lapangan untuk membina para petani mitra.

## B. Perumusan Masalah

Konsumsi pisang dalam negeri yang terus meningkat menyebabkan permintaan pisang meningkat. Peningkatan permintaan pisang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pisang. Hal ini menyebabkan kekurangan suplai pisang di pasaran. Untuk meningkatkan produksi pisang dibutuhkan budidaya pisang yang baik sesuai dengan standar dan prosedur. Di dalam kegiatan usahatani pisang banyak dijumpai permasalahan, salah satunya adalah pemasaran. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan kemitraan.

Kemitraan merupakan inovasi yang diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan di sektor pertanian. Konsep kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling bertanggung jawab sebagai modal dasar keberlangsungan kegiatan tersebut. Pandangan terhadap kemitraan tidak selalu bernilai positif. Tidak sedikit yang beranggapan negatif terhadap kemitraan. Kemitraan dianggap akan membuat petani tidak mandiri dan selalu ketergantungan kepada perusahaan. Bahkan ada kemitraan yang merugikan petani.

PT Mulia Raya merupakan perusahaan yang bergerak sebagai distributor pisang, nanas dan melon. PT Mulia Raya melakukan kerjasama kemitraan dengan kelompok tani pisang ambon di Provinsi Lampung. Hubungan kemitraan antara petani pisang dengan PT Mulia Raya mulai dilakukan pada tahun 2009 hingga saat ini. Lokasi tanam berada di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Permintaan akan pisang PT Mulia Raya

sebesar 75-90 ton untuk ambon kuning per minggu, pisang emas 15 ton per minggu, raja bulu dan barangan masing-masing 2 ton per minggu.

Pada kenyataannya di lapangan permintaan akan pisang oleh PT Mulia Raya hanya terpenuhi setengah dari permintaan. Oleh karena itu untuk menjaga kontinuitas pasokan, PT Mulia Raya menggandeng pengepul. Pengepul diminta melakukan sortir dari pekebun berikut penanganan pascapanen di daerah lain (Lampung Selatan). Selama petani melakukan sistem kemitraan dengan PT Mulia Raya, tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat diantara keduanya, namun kemitraan tetap berlanjut hingga sekarang.

Dengan melakukan kemitraan banyak kelebihan, kelemahan, manfaat, dan kendala yang didapat oleh petani yang bermitra maupun oleh perusahaan. Kendala yang dihadapi petani antara lain harga ditentukan secara sepihak oleh perusahaan, pengetahuan petani terbatas, informasi tidak tersebar secara merata, tidak adanya perjanjian yang disepakati atau *Memorandum of Understanding (MoU)*. MoU ini merupakan hal terpenting dalam sebuah kemitraan, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. MoU merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang dituangkan dalam bentuk dokumen hukum.

Dari uraian yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kemitraan antara PT Mulia Raya dengan petani pisang ambon di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan petani pisang ambon melakukan kemitraan dengan PT Mulia Raya di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?
3. Apakah terdapat perbedaan antara pendapatan usahatani pisang ambon petani mitra dengan pendapatan usahatani pisang ambon petani yang tidak bermitra di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pelaksanaan kemitraan antara PT Mulia Raya dengan petani pisang ambon di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani pisang ambon melakukan kemitraan dengan PT Mulia Raya di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
3. Membandingkan pendapatan usahatani pisang ambon petani mitra dengan pendapatan usahatani pisang ambon petani yang tidak bermitra di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat sebagai :

1. Informasi dan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi petani pisang dalam melakukan kemitraan di Kabupaten Pesawaran.

2. Informasi bagi PT Mulia Raya sebagai bahan masukan dan evaluasi sistem kemitraan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran.
3. Informasi bagi pihak-pihak terkait dalam pengembangan kemitraan.
4. Sumber pustaka dan informasi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis pada waktu yang akan datang.